

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Aditya Achmad Fathony

e-mail : aditya_fathony@yahoo.co.id

Djodi Setiawan

email : djodisetiawan130671@gmail.com

Ima Ananda Choirunnisa

email : iimaanandaaa@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan **Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung**.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang disebar kepada 35 responden di 7 instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 0,001 lebih kecil dari pada 0,05 dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ini dibuktikan dengan signifikansi 0,000. Fan hasil uji F menunjukkan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan signifikansi 0,000 berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

**Kata Kunci : Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah**

I. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang memuaskan dalam hal ini tata kelola yang baik atau *good governance*, maka pemerintah harus berupaya melakukan peningkatan kinerja pemerintahan daerahnya itu sendiri. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata mata dari prepektif keuangan, surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak menjadi tolok ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari penilaian kinerjanya. Oleh sebab itu, aspek pertanggungjawaban tentu tidak cukup hanya berupa laporan keuangan, tetapi juga harus dilengkapi dengan kinerja yang baik.

Meluasnya praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin merusak citra publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Kondisi penyelenggaraan publik jelas dihadapkan pada kinerja pemerintahan yang belum efektif dan juga efisien serta kualitas sumber daya manusia perangkat pemerintahan yang belum memadai. KKN tidak hanya membuat pelayanan birokrasi menjadi sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya tetapi juga membuat masyarakat harus

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung|Aditya Achmad Fathony, Djodi Setiawan, Ima Ananda Choerunnisa

membayar mahal pelayanan yang dilaksanakam oleh swasta. Fenomena ini bukan merupakan rahasia umum lagi karena telah menggejala meluas sampai pada tataran tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang terendah yaitu kelurahan atau desa.

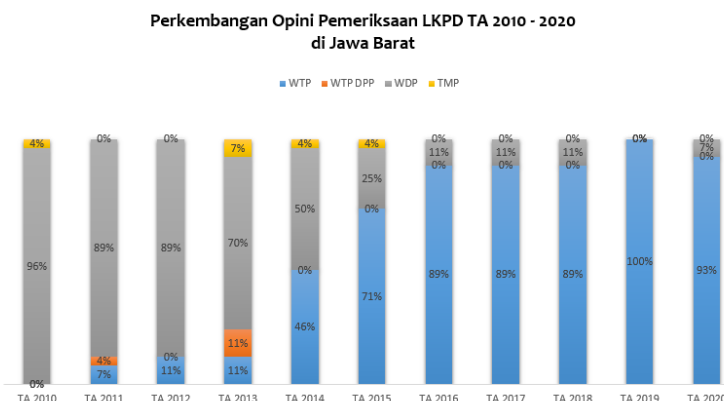
Permasalahan masih dihadapi yaitu banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media masa, seperti prosedur yang terlalu berbelit belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan-persyaratan yang tidak transparan, serta sikap petugas kurang responsif, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja pemerintah.

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah sebagai alat bagi manajemen organisasi untuk meningkatkan kualitas dalam rangka pengambilan keputusan dan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangkan mewujudkan visi dan misi organisasi Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dilakukan melalui penilaian yang sistematis bukan hanya pada input tetapi juga pada output, benefit dan *impact* yang ditimbulkan.

Sejalan dengan pelaksanaan kinerja pemerintah daerah diperlukan implementasi sistem akuntansi yang baik, karena pengimplementasian sistem akuntansi berperan dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah sekaligus mengukur kinerja pemerintah daerah. Sistem Akuntansi yang diterapkan di lingkungan pemerintahan yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan, SAP.

Selain sistem akuntansi keuangan daerah, ada faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah yaitu pengelolaan keuangan daerah. Tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi salah satu alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi masalah ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dan berjalan dengan baik. Gagal dalam merencanakan sesungguhnya merencanakan sebuah kegagalan.

Tahun 2021 BPK RI melakukan audit atas LKPD tahun 2020. Berdasarkan hasil audit tercatat hasil perkembangan opini LKPD dari pemerintahan daerah di Jawa Barat dari tahun 2010 sampai 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD TA 2010-2020 di Jawa Barat

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK RI yang diakses melalui <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3> pada tanggal 7 April 2022

Gambar dan tabel tersebut menunjukkan opini LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2020 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari opini LKPD yang memperoleh WTP yang mencapai 93%. Keberhasilan pelaporan keuangan daerah yang diwujudkan dengan memperoleh opini WTP idealnya juga mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut dan pengimplementasian sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengimplementasian sistem akuntansi keuangan daerah tentunya akan berdampak positif terhadap pemerintah daerah.

Permasalahan yang terjadi pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan masalah yang menjadi sorotan oleh masyarakat adalah masih kurang efektifnya kinerja tersebut karena pencapaian yang diinginkan kadang tidak sesuai dengan kriteria dan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu masih ada permasalahan-permasalahan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, diantaranya masih kurangnya karyawan dan karyawan yang memiliki pengetahuan bidang ilmu pemerintahan (yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Bandung di Kecamatan Margahayu).

Lalu permasalahan lainnya yang penulis kutip dari Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat, Kabupaten Bandung mendapatkan index SPBE sebesar 2,98 dengan predikat baik dari KEMENPAN. Yang menduduki peringkat ke-8 se-Jawa Barat dibawah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Sukabumi, memang sudah cukup baik tapi harus bisa lebih ditingkatkan kembali dikarenakan Pemda Kabupaten Bandung ini memiliki potensi yang besar.

Selanjutnya masalah yang saat ini sedang ramai diperbincangkan yaitu ratusan Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Bandung dirotasi dan mutasi oleh Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna. Rotasi dan mutasi ini merupakan buntut dari ditemukannya ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas ketika bupati melakukan sidak langsung beberapa waktu lalu setelah libur hari raya nyepi. Rotasi dan mutasi ini untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung lebih disiplin dan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada warganya.

Dilihat dari fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan bahwa kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Bandung belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Maka dari pada itu perlu adanya sistem yang dapat menjadi landasan bagi organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim & Syam Kusufi (2012:94) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Demikian pula menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran,

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung|Aditya Achmad Fathony, Djodi Setiawan, Ima Ananda Choerunnisa

peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Sementara menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) sistem akuntansi keuangan daerah dapat diartikan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

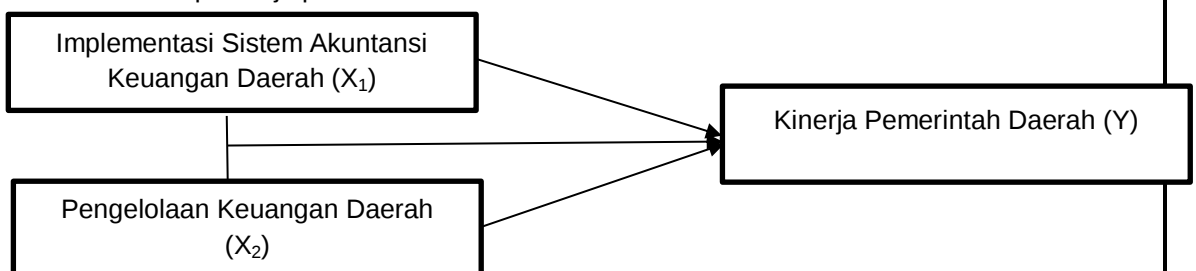
Menurut Muindro Renyowijoyo (2013:199) bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara Rosmary Elsie (2016:2) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian menurut Baldrice Siregar (2015:11) bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.1.3 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut BPPK Depkeu (2014) kinerja instansi pemerintahan daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintahan sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Eko Widodo (2015:133) menjelaskan pengertian kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian menurut Chabib Soleh dan Suropto (2011:3) bahwa pengertian kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah:



Gambar 2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konsep yang disusun dalam penelitian ini, maka hipotesis atau dugaan awal penelitian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Terdapat pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Terdapat pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2), dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penulis menggunakan metode tersebut, karena penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dari data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2018:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang berjumlah 3 dinas dan 4 badan, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, Bapelit Bagda Kabupaten Bandung, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

3.2.1.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2018:80) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dan, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik yang diambil yaitu *purposive sampling*, yang mana bahwa definisinya menurut Sugiyono (2018:80) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya.

Maka dari itu, sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 35 dari anggota populasi yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah berupa data kuesioner yang telah diisi oleh responden.

3.2.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.2.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2017:275) Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya (dimanipulasi). Analisis regresi berganda akan dilakukan apabila jumlah dari variabel independennya minimal 2.

Apabila dijabarkan secara matematis, bentuk persamaan dari regresi linear berganda ialah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber : Sugiyono (2017:275)

Keterangan :

Y : Variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan)

X₁ : Variabel bebas (Penerapan Standar Akuntansi)

X₂ : Variabel bebas (Sistem Pengendalian Internal)

A : Bilangan berkonsta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X₁X₂ = 0

b₁ b₂ : Koefisien regresi

3.2.2.2 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dan Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Analisis koefisien korelasi meliputi koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi ganda.

3.2.2.3 Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi ganda (R) diketahui serta untuk membuktikan hasil pengaruh secara simultan, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Sumber : Imam Ghazali (2016:98)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R² = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

3.2.2.4 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiono (2017:230) mendefinisikan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H₀) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan

hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini :

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji-t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Maka pengujian tingkat signifikannya menggunakan rumus berikut:

$$t = \frac{r_p \sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r_p^2}}$$

Sumber : Sugiyono (2017:230)

Keterangan :

r_p = Korelasi Parsial
 n = Banyaknya Sampel

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
- Apabila menggunakan program komputer (*software* SPSS), jika nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji-F dilakukan untuk melihat apakah penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian internal bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka pengujian tingkat signifikannya menggunakan rumus berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Sumber : Sugiyono "Statistika Untuk Penelitian" (2017:235)

Keterangan :

R^2 = Koefisien Korelasi ganda
 K = Jumlah variabel independen
 n = Jumlah anggota sampel
 dk = $(n - k - 1)$ Derajat kebebasan

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu :

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
- Apabila menggunakan program komputer (*software* SPSS), jika nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Berganda

Tabel 1

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung|Aditya Achmad Fathony, Djodi Setiawan, Ima Ananda Choerunnisa

Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	3049.576	5151.268		.592	.558					
1 IMPLEMENTASI SAKD	.373	.101	.411	3.699	.001	.641	.547	.375	.831	1.204
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	.579	.115	.560	5.040	.000	.729	.665	.510	.831	1.204

a. Dependent Variable: KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20.

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3047,576 + 0,373 X_1 + 0,579 X_2$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

X₁ = Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X₂ = Pengelolaan Keuangan Daerah

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta dengan nilai 3049,576 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen (X₁ dan X₂ = 0), maka Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 3049,576.
2. b₁ sebesar 0,373 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X₁ sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0,373 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
3. b₂ sebesar 0,579 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pengelolaan Keuangan Daerah X₂ sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0,579 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

4.1.2 Analisis Korelasi

Tabel 2
Hasil Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*
Correlations

		IMPLEMENTASI SAKD	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KINERJA PEMERINTAH DAERAH
IMPLEMENTASI SAKD	Pearson Correlation	1	.411*	.641**
	Sig. (2-tailed)		.014	.000
	N	35	35	35
PENGELOLAAN	Pearson Correlation	.411*	1	.729**

KEUANGAN DAERAH	Sig. (2-tailed)	.014		.000
	N	35	35	35
KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Pearson Correlation	.641**	.729**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan *software* SPSS Versi 20

Tabel 3
Hasil Uji Korelasi Ganda (R)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.820 ^a	.672	.651	4697.632	2.114

a. Predictors: (Constant), X₂, X₁

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan data dengan *software* SPSS Versi 20

Dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi di atas, menunjukkan bahwa:

1. Korelasi antara Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,641. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60 – 0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Pemerintah Daerah (Y).
2. Korelasi antara Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,729. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60 – 0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Pemerintah Daerah (Y).
3. Korelasi ganda antara Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) dan Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) secara simultan dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,820. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena nilainya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁) dan Pengelolaan Keuangan Daerah (X₂) secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

4.1.3 Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R-Square)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.672	.651	4697.632

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung|Aditya Achmad Fathony, Djodi Setiawan, Ima Ananda Choerunnisa

a. Predictors: (Constant), PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH, IMPLEMENTASI SAKD

b. Dependent Variable: KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sumber : Pengolahan data dengan *software* SPSS Versi 20

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,672. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,672 (67,2%). Artinya, Kinerja Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 67,2%.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Secara Parsial Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 5
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	3049.576	5151.268		.592	.558					
1 IMPLEMENTASI SAKD	.373	.101	.411	3.699	.001	.641	.547	.375	.831	1.204
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	.579	.115	.560	5.040	.000	.729	.665	.510	.831	1.204

a. Dependent Variable: KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sumber : Pengolahan data dengan *software* SPSS Versi 20

Pada tabel 5 serta hasil perhitungan diatas, nilai t_{hitung} untuk Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) adalah 3,699 pada t_{tabel} dengan dk 32 ($n-3 = 35-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,0369 (lihat t_{tabel} pada lampiran). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,699 > 2,0369) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Pengaruh Parsial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pada tabel 5 nilai t_{hitung} untuk Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) adalah 5,04 pada t_{tabel} dengan dk 32 ($n-3 = 35-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,0369 (lihat t_{tabel} pada lampiran). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,04 > 2,0369) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3. Pengaruh Secara Simultan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 6
Hasil Perhitungan Uji-F
Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1445327363.744	2	722663681.872	32.748	.000 ^b
	Residual	706167980.428	32	22067749.388		
	Total	2151495344.171	34			

a. Dependent Variable: KINERJA PEMERINTAH DAERAH

b. Predictors: (Constant), PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, IMPLEMENTASI SAKD

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20

Dari hasil tabel 6 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 32,748 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 32 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,295 (lihat F_{tabel} pada lampiran). Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, ($32,748 > 3,295$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Secara Parsial Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil verifikasi, bahwa variabel Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) mempunyai pengaruh sebesar 26,3%. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Pemerintah Daerah, demikian pula sebaliknya. Kemudian hasil uji-t bahwa Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,699 > 2,0369$) serta nilai sig dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,001, kemudian pada gambar kurva dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Parsial Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil verifikasi, bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1) mempunyai pengaruh sebesar 40,8%. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pengelolaan Keuangan Daerah akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Pemerintah Daerah, demikian pula sebaliknya. Kemudian hasil uji-t bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,04 > 2,0369$) serta nilai sig dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, kemudian pada gambar kurva dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Simultan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien Determinasi (R^2) yang dinyatakan dalam persentase menggambarkan besarnya kontribusi semua variabel bebas yaitu Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2) dalam menentukan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 67,2% dan sisanya sebesar 32,8% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, ($32,748 > 3,295$) serta nilai sig dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, kemudian pada gambar uji Fihak kanan bahwa F_{hitung} berada pada daerah penolakan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Pengelolaan Keuangan

Daerah (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmad dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Peneliti dapat memahami bahwa secara bersama-sama apabila Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara tepat maka akan menentukan Kinerja Pemerintah Daerah yang semakin baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan yang telah peneliti bahas sebelumnya, maka peneliti mendapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengolahan data deskriptif, dapat digambarkan bahwa variable Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berada pada kategori “Baik”, dalam penelitian ini Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Ini semua menunjukkan bahwa semakin baik Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka secara otomatis Kinerja Pemerintah Daerah akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah tingkat pengimplementasian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka Kinerja Pemerintah Daerah akan semakin menurun oleh karena itu Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kontribusi yang diberikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ini belum maksimal dengan demikian perlunya peningkatan kontribusi dari Pengelolaan Keuangan Daerah disetiap Instansi terhadap Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah harus lebih ditingkatkan agar Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mencapai kriteria yang “Baik” dan mempunyai kontribusi yang maksimal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data deskriptif, dapat disimpulkan bahwa variabel Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berada pada kategori “Baik”, ini sejalan dengan opini LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan signifikan dari opini LKPD yang memperoleh WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.
4. Berdasarkan hasil analisis uji pengaruh parsial antara Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan variable Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai hubungan positif yang kuat dan signifikan, hal ini berarti Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
5. Dari hasil uji pengaruh parsial antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah mempunyai hubungan positif yang kuat dan signifikan,

hal ini berarti Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

6. Secara simultan, variable bebas Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan variable terikat. Secara realita kedua variabel ini masing-masing memiliki kontribusi apabila secara bersama-sama. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah diterapkan dan dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.

5.1 Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung:

1. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil yang ada meraih signifikan yang positif, kemudian Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah harus diperhatikan dan terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memperbanyak pelatihan atau diklat agar pegawai semakin paham mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan baik, serta mengadakan evaluasi dari hasil pelatihan atau diklat yang telah dilakukan agar dapat dinilai sejauh mana pemahaman dan pengimplementasian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil yang ada meraih signifikan yang positif, kemudian Pengelolaan Keuangan Daerah harus diperhatikan dan terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan cara mengikuti rencana dan perbaharui situasi sesuai dengan situasi yang ada, sehingga Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi lebih baik.
3. Meninjau lebih lanjut Kinerja dari setiap instansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, khususnya dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, menetapkan program manajemen berbasis kinerja serta mengevaluasi hasil kinerja dari setiap instansi yang ada, tentunya berguna untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Untuk bisa meningkatkan pengimplementasian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaiknya Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan dan selalu memperbaharui mengenai Standar Akuntansi Pemerintah serta mengintegrasikan manajemen akuntansi dengan manajemen lainnya agar Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik.
5. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil yang ada meraih signifikan yang positif, kemudian Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah harus diperhatikan dan terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membuat kebijakan dan deadline, serta menyediakan pelatihan sehingga

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung|Aditya Achmad Fathony, Djodi Setiawan, Ima Ananda Choerunnisa

pengimplementasian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah otomatis Kinerja Pemerintah Daerah menjadi meningkat.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan hasil yang ada meraih signifikan yang positif, kemudian Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah harus diperhatikan dan terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengurangi pekerjaan manual dalam hal keuangan, serta memperbanyak berkomunikasi dengan staf keuangan sehingga Pengelolaan Keuangan Daerah dan otomatis Kinerja Pemerintah Daerah menjadi meningkat.

5.2.2 Bagi peneliti selanjutnya:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya sebaiknya mengukur semua variabel yang diteliti dengan membuat soal uraian/ Pernyataan dengan tingkat kesulitan yang berjenjang untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai yang sesungguhnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel bebas baru dan dapat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah seperti Kualitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Memperluas lokasi penelitian, memperbanyak jumlah sampel dan melakukan metode survei dengan wawancara secara mendalam untuk meningkatkan keseriusan dan kepedulian responden dalam menjawab pernyataan, serta mengurangi subjektivitas dari responden yang mengakibatkan penelitian ini rentan terhadap bias jawaban responden
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah wawancara dalam penelitian ini untuk hasil yang lebih maksimal dengan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagian keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014). hal. 27
- Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat*. (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 94
- Baldric Siregar. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Edisi pertama. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal 11
- Bambang Martin dan Sripenim Rusbiyanti. *Budaya Birokrasi Publik, dan Potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*. 2020 yang diakses melalui <https://jurnalfti.unmer.ac.id> pada tanggal 23 April 2022 pukul 11.24
- Bolos Kerja Pasca Libur Nyepi, ASN Pemkab Bandung di Mutasi, yang diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/268970/videos/bolos-kerja-pasca-libur-nyepi-asn-pemkab-bandung-di-mutasi> 25 April 2022 Pukul 16.37
- BPPK Kemenkeu pada tahun 2014 yang diakses melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id> pada tanggal 31 Januari 2022 pukul 17.09
- Chabib Soleh dan Suripto. *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Fokus Media, 2011), hal. 3

- Eko Widodo Suparno. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal.133
- Erlina, Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. (Medan : Brama Ardian, 2013), hal. 6.
- Hasanah, Nurmala. *Akuntansi Pemerintahan*. (Jakarta : In Media, 2016), hal. 195.
- Keputusan Menteri No. 1503 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang diakses melalui <https://kominfo.go.id> pada tanggal 10 Februari 2022 Pukul 17.09
- LKIP Kecamatan Margahayu yang diakses melalui <https://www.bandungkab.go.id> pada tanggal 10 Februari
- Muindro Renyowijoyo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 199
- Nordiawan, D., Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. Jilid 1. Edisi 2. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal.157
- Rosmary Elsy. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrua Pemerintahan Daerah*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), hal 2
- Sang Ayu Putu, Cokorda dan Iputu Tresna. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar*. 2020
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). hal. 80
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017) halaman 275
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017) halaman 230